

**IMPLEMENTASI PROGRAM STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN TEBING
TINGGI KABUPATEN BALANGAN
(Studi kasus di desa Sungsum dan desa Ju'uh)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat penyusunan Proposal Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MARHAMAH

NPM. 2022 531

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : MARHAMAH

NPM : 2022531

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN BALANGAN SANITASI LAYAK DAN AMAN (BASALAMAN) DALAM MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT MASYARAKAT DESA JU'UH KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP.
NUPTK. 1635759660230280

Amuntai, 13 Februari 2026
Pembimbing II,

Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.A.
NUPTK. 2742773674130272



Mengetahui

Kepala Prodi Administrasi Publik,

Abdullah Baihaqi, S.Sos, M.A.
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atasrahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. sehingga menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN** (Studi kasus di desa Sungsum dan desa Ju’uh)” ini dengan baik. Dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
1. Ibu Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP . selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.sos, M.AP . selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

4. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA Amutai terima kasih atas dukungan motivasi serta doa'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
6. Orang tua saya yang selalu mendo'akan untuk pendidikan dan kesuksesan saya kelak, serta adik saya yang selalu ada, baik untuk kebutuhan ekonomi, kebersamaan, dan kekeluargaan.
7. Orang yang belum bisa saya tuliskan namanya, terimakasih sudah mensupport sampai titik ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan Proposal Skripsi ini.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian Dan Mamfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Tipe Penelitian	30
D. Data Dan Sumber Data	30
E. Desain Operasional.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Uji Kredibilitas	37
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Pemikiran	33
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	36
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	38

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan sanitasi hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan permukiman pinggiran sungai. Salah satu masalah sanitasi yang masih banyak dijumpai adalah kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai, kebun, sawah, atau tempat terbuka lainnya. Perilaku ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran air, penurunan kualitas lingkungan, serta penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan.

Kebiasaan BABS mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tinja yang dibuang di tempat terbuka dapat mencemari sumber air, mengundang lalat dan vektor penyakit, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Permasalahan ini bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku, pola pikir, dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini merupakan pendekatan nasional yang bertujuan mengubah perilaku higienis dan saniter masyarakat melalui pemberdayaan dan kesadaran kolektif dengan metode pemicuan (triggering). STBM menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan dengan prinsip tanpa paksaan, tanpa subsidi, dan berbasis kesadaran diri.

Program STBM memiliki lima pilar utama, yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT);

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Dari kelima pilar tersebut, pilar pertama “Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)” menjadi dasar utama pelaksanaan STBM. Pilar ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi buang air besar di tempat terbuka, serta memanfaatkan sarana jamban sehat yang memenuhi syarat kesehatan. Tujuan utamanya adalah:

- Memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan, terutama yang disebabkan oleh kontaminasi tinja manusia terhadap air, tanah, dan makanan;
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan tanpa bergantung pada bantuan dari luar;
- Mendorong terbentuknya Desa ODF (Open Defecation Free) atau desa bebas buang air besar sembarangan sebagai langkah awal menuju kondisi sanitasi total

Pelaksanaan program STBM dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan saling berkaitan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, puskesmas, kader kesehatan, dan masyarakat desa. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan perubahan perilaku berjalan secara berkelanjutan. Berikut alur pelaksanaannya:

1. Tahap Perencanaan ; Pemerintah daerah bersama pihak puskesmas melakukan pemetaan kondisi sanitasi masyarakat, termasuk tingkat perilaku BABS, lokasi rawan penyakit, serta kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi. Dari hasil pemetaan ini ditentukan desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan STBM. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi lintas sektor, seperti dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat agar program berjalan terintegrasi dan berkesinambungan.
2. Tahap Pemicuan (Triggering) ; Tahapan ini merupakan inti dari pendekatan STBM. Fasilitator dari puskesmas atau kader kesehatan melakukan

pemicuan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap bahaya buang air besar sembarangan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pembuatan peta sanitasi desa, untuk menunjukkan titik-titik tempat masyarakat biasa melakukan BABS;
- Simulasi alur kontaminasi tinja, yang menggambarkan bagaimana tinja dapat mencemari air dan makanan;
- Diskusi kelompok dan refleksi diri, agar masyarakat merasa jijik, malu, dan terdorong untuk berubah.

Tujuan dari tahap ini adalah agar masyarakat terpacu dari dalam dirinya sendiri (self-motivated) untuk berhenti BABS dan membangun jamban sehat secara mandiri, bukan karena perintah atau bantuan.

3. Tahap Pembentukan Kelompok dan Rencana Aksi Masyarakat ; Setelah kegiatan pemicuan, masyarakat membentuk kelompok kerja STBM di tingkat desa. Kelompok ini beranggotakan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan relawan yang bertugas menyusun rencana aksi.

Rencana aksi mencakup:

- Penetapan target waktu pencapaian Desa ODF;
- Kegiatan sosialisasi dari rumah ke rumah;
- Gotong royong atau swadaya masyarakat dalam pembangunan jamban sehat;
- Sistem pengawasan antarwarga untuk memastikan tidak ada lagi praktik BABS.

4. Tahap Pendampingan ; Petugas kesehatan, kader, dan kelompok kerja STBM melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat. Pendampingan mencakup edukasi, motivasi, dan pemantauan proses perubahan perilaku. Dalam tahap ini, kader STBM berperan penting sebagai penggerak di tingkat lokal untuk memastikan masyarakat konsisten menjalankan komitmennya. Pendampingan juga melibatkan perangkat desa dalam membuat aturan atau kesepakatan lokal guna memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap perilaku Stop BABS.

5. Tahap Verifikasi dan Deklarasi ODF (Open Defecation Free) ; Setelah semua warga desa berhenti melakukan BABS, dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Proses verifikasi mencakup pengecekan jamban sehat dan wawancara dengan warga. Jika seluruh kriteria terpenuhi, desa akan dideklarasikan sebagai Desa ODF, yaitu desa bebas buang air besar sembarangan. Deklarasi ini menjadi bentuk pengakuan terhadap keberhasilan masyarakat dalam mengubah perilaku dan menjaga lingkungan sehat.
6. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan ; Setelah deklarasi, kader STBM dan petugas puskesmas melakukan pemantauan berkala untuk memastikan masyarakat tetap konsisten dan tidak kembali pada kebiasaan lama. Tahapan ini juga menjadi dasar untuk melanjutkan penerapan ke pilar-pilar STBM lainnya seperti cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan sampah rumah tangga.

Seluruh alur ini dirancang agar masyarakat tidak hanya sekadar berhenti melakukan BABS, tetapi juga tumbuh menjadi komunitas yang sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan dan mampu mempertahankan perilaku hidup bersih secara mandiri.

Meskipun program STBM telah dilaksanakan di berbagai daerah sejak tahun 2014, perilaku buang air besar sembarangan masih ditemukan di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi secara instan dan memerlukan proses pendampingan yang konsisten. Faktor budaya, kebiasaan lama, dan rendahnya kesadaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai implementasi program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di masyarakat, faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas program tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program Stop BABS, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat

pelaksanaan STBM menuju masyarakat yang sehat, bersih, mandiri, dan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Dengan adanya beberapa uraian di atas maka peneliti menemukan Fenomena masalah yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi pada desa Sungsum dan desa Ju'uh) yang menjadi alasan tertariknya peneliti untuk meneliti permasalahan ini dan akan dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut :

1. Desa Sungsum

- a. Pendampingan dan pemicuan dari tenaga kesehatan atau kader STBM belum berjalan secara berkelanjutan.
- b. Masih ada beberapa bangunan jamban di bantaran sungai desa sungsum . Hal ini di karenakan sebagian masyarakat bertempat tinggal dekat dengan sungai dan ini yang menjadi penunjang masyarakat melakukan Buang Air Besar Disungai.
- c. Kurangnya sosialisasi baik secara langsung maupun himbauan berupa spanduk kepada masyarakat terkait program stop buang air brsar sembarangan . sehingga kebiasaan tidak sehat tersebut dilakukan terus menerus

2. Desa Ju'uh

- a. Peran pemerintah desa dan dinas kesehatan dalam monitoring serta evaluasi program BABS belum optimal.
- b. Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Hal ini mungkin di karenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi total berbasis masyarakat yang di programkan pemerintah.
- c. Tidak adanya tindakan hukum / sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar kebijakan / program tersebut. Oleh karena itu masyarakat tetap melanggar kebijakan tanpa memikirkan akibatnya bagi lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa fenomena dan fakta yang di temukan di lapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Implementasi Program Stop Buang Air Besar**

**Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan
(Studi pada desa Sungsum dan Desa Ju'uh).''.**

B. Fokus Penelitian

Berdasar uraian tersebut, agar penelitian lebih terarah dan menghindari adanya kesimpangsiuran serta dapat mengenai sasaran yang diharapkan, maka penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi kasus pada desa Sungsum dan desa Ju'uh). Fokus penelitian ini menurut model implementasi dari teori Van Matter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2017) yaitu sebagai berikut ;

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap dan kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, agar sejalan dengan batasan masalah dan agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi pada desa Sungsum dan Desa Ju'uh).
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi pada desa Sungsum dan Desa Ju'uh)..

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan didapat dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi pada desa Sungsum dan Desa Ju'uh).
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi pada desa Sungsum dan Desa Ju'uh).

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoristis

Manfaat Teoristis yaitu untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi pada desa Sungsum dan Desa Ju'uh).. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna pengembangan ilmu administrasi negara.

b. Manfaat praktis

Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sumbangan pemikiran bagi Kantor Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan Kebijakan Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Dengan Tidak Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

Selain itu semoga Proposal Skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan di Sekolah tinggi Administrasi Publik STIA Amuntai, dan juga Proposal Skripsi ini dapat berguna sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Amin (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai ,dalam penelitian ini berjudul tentang Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Focus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier yang terdiri dari 3 variabel yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan , dan lingkungan kebijakan. Sumber data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemui antara lain kondisi geografis permukiman yang berada di pinggir sungai, kemajemukan masyarakat dengan kebiasaan lama dan tingkat pendidikan rendah, keterbatasan sumber daya finansial, serta konsistensi aparat dalam menerapkan kebijakan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging dan keterampilan aparatur yang masih terbatas turut mempengaruhi efektivitas program. Meski demikian, penelitian ini menemukan adanya perubahan perilaku masyarakat, kejelasan kebijakan, dukungan antar-institusi, komitmen aparat, partisipasi masyarakat, serta dukungan publik yang positif. Faktor-faktor penunjang lainnya termasuk kesadaran masyarakat dan peran sosialisasi program. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan frekuensi sosialisasi, pengawasan desa, pemanfaatan bantuan MCK sehat oleh masyarakat, serta keterlibatan Duta

Lingkungan dan media edukasi untuk mempercepat keberhasilan program Stop BABS.

2. Vivi Rizky Januarti (2018) dalam penelitian ini berjudul tentang “Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*) Didesa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin” Jurusan Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya jamban warga desa yang belum sesuai kriteria Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Ripley dan Franklin, di mana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga dimensi yaitu (1) tingkat kepatuhan, (2) kelancaran rutinitas fungsi serta (3) kinerja dan dampak implementasi yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan untuk dimensi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan program masih belum maksimal, kelancaran rutinitas fungsi belum berjalan lancar, dan kinerja dan dampak implementasi yang diinginkan belum maksimal dan belum tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Program Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyu Asin Belum berhasil.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya namun pada penelitian ini lebih mengarah Implementasi Program pada Kecamatan Tebing Tinggi, selain itu keterbaruan Judul penulisan, teori yang digunakan, dan tahun yang berbeda. Dengan tujuan semoga dengan penelitian ini masyarakat lebih bisa sedikit banyaknya bisa mengubah kebiasaan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islami, 2001; Abdul Wahab, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”. Oleh karena itu *public policy* diartikan sebagai kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014:35), mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut :

“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih tujuannya”.

Menurut Thomas R. Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan badan dan aparat pemerintah.

Menurut David Easton, *“ public policy is the authoritative allocation of values for the whole society ”* kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik adalah dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan

maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan public ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

b. Model-model Kebijakan Publik

Model merupakan penyajian baik secara abstrak maupun operasional, namun menggunakannya diperlukan untuk keperluan analisis/penelitian yang baik-buruknya suatu model akan sangat tergantung pada kompleksitas masalah kebijakan yang dikaji dan tujuan dari analisis itu sendiri.

Menurut Thomas R. Dye (Agustino,2017:131), Kebijakan Publik terdiri dari beberapa model-model formulasi kebijakan publik, yaitu :

1. Model Sistem adalah tindakan mungkin terwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar (untuk kemudian memberi corak terhadap lingkungan). Instrumennya adalah input, proses/transformasi, output, feedback, dan lingkungan itu sendiri.
2. Model Elit adalah abstraksi dari keinginan elite yang berkuasa di mana realitas dalam dunia real pragmatis menunjukkan pemenang kekuasaan tugas formulasi kebijakan. Secara teoritis, model ini menunjukkan pada teori politik konvensional terkait dua kelompok masyarakat yakni kelompok masyarakat yang berkuasa dan kelompok masyarakat yang dikuasai.
3. Model Institusional (Kelembagaan) adalah model ini berkaitan dengan paradigma politik tradisional yang menyatakan tugas formulasi kebijakan merupakan tugas formulasi kebijakan sebagai tugas sentral lembaga-lembaga pemerintah secara otonom tanpa perlu berinteraksi dengan lingkungannya.
4. Model Kelompok adalah abstraksi ini pertikaian atau konflik kepentingan antar kelompok atau antar kepentingan partai politik dalam suatu institusi atau pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan publik.
5. Model Proses adalah suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang berujung evaluasi kebijakan publik dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang harus dilakukan oleh para formulator kebijakan agar yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai.
6. Model Rasional adalah bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dan sudah diperhitungkan rasional costs and benefits-nya bagi masyarakat.
7. Model Inkremental adalah formulasi kebijakan yang berusaha untuk merevisi formulasi kebijakan rasional.
8. Model Pilihan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memang berabsi pada pilihan publik mayoritas.

9. Model Teori Permainan adalah kebijakan publik yang berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna, sehingga pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambilan keputusan lain dapat diterima.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap- tahap kebijakan publik menurut Analisis William Dunn dalam (Sahya Anggara 2018;120) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Agenda *setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah public dan prioritas dalam agenda public yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah public dan mendapatkan prioritas dalam agenda public, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya public yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda *setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu public yang akan di angkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tersebut di definisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dsalam agenda kebijakan. Dalam tahapan perumusan kebijakan, tiap-tiap alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi Kebijakan/ Legitimasi kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Dukungan untuk rezim cenderung berdefusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membentuk anggota menoleransi pemerintahan di sonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang

mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Agustino,(2020:179).

Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah public, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

d. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Adapun tujuan perumusan pembuatan kebijakan yaitu:

1. Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat
3. Untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi

Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda *setting*, *formulation*, *adoption* dan tahapan sesudahnya *osseesement* .

Seorang ahli kebijakan Batcdach yang dikutip oleh Agustino (2017:138) Dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* sebagai berikut :

“Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi sulit

merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien”.

Selain itu menurut Derajat lain Daniel Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Agustino (2017:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbantuan perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahya Anggara (2018:232) mengidentifikasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Gordon dalam Pasalong (208:58) dalam Deddy Mulyadi (2016:24) “implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah di seleksi. Mengorganisasikan berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program”.

a) Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Model-model Implementasi Kebijakan Publik merupakan penyajian baik secara abstrak maupun operasional, namun penggunaannya diperlukan untuk keperluan analisis/penelitian yang baik-buruknya suatu model akan sangat tergantung pada kompleksitas masalah kebijakan yang dikaji dan tujuan dari analisis itu sendiri. Semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional, yakni model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Selanjutnya uraian tentang model-model implementasi kebijakan bersumber pada teori Para ahli yaitu sebagai berikut:

1) Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel H. Mazmanian & Paul A.Sabatier (Leo Agustino (2017) Model Implementasi yang di tawarkan mereka disebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik Masalah (Tractability of the Problem) ; tingkat kesulitan masalah yang dihadapi serta kemampuan masyarakat dalam merespons kebijakan. Masalah yang kompleks akan menyulitkan pelaksanaan kebijakan.
2. Kemampuan Kebijakan dalam Menstrukturkan Implementasi (Ability of the Statute to Structure Implementation) ; sejauh mana kebijakan dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai tujuan, prosedur, koordinasi, serta sumber daya untuk pelaksanaannya.
3. Faktor Nonkebijakan (Nonstatutory Variables) ; meliputi dukungan sosial, politik, budaya, dan kondisi lingkungan yang dapat memperkuat atau melemahkan keberhasilan implementasi.

2) Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh VanMeter dan Horn Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn (Leo Agustino, 2017:133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyatkan oleh

kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. indikator untuk karakteristik agen pelaksana.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan dimana mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan lingkungan eksternal.

3) Model George C. Edward III

Berdasarkan teori George C. Edwards III dalam (Leo Agustino 2020: 149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau di akomodasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu: 1) Transmisi, 2) Kejelasan, 3) Konsekuensi.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 1) Staf, 2) Informasi, 3) Wewenang, 4) Fasilitas.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah: 1) Pengangkatan birokrasi, 2) Insentif.

4) Birokrasi

Dua karakteristik, menurut George C. Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: Melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya 28 pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran

tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2020:144).

Subarsono (2021:87) mengungkapkan dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya”.

Menurut Kadji (2015:47-48) “implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya”.

Sementara Mazmanian dan Sabatier dalam Kadji (2015:48) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.

Kemudian Van Metter dan Van Horn dalam Kadji (2015:49), mendefinisikan bahwa ” implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan”.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan teknis operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana serta sumber daya lainnya disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Kadji, 2015:49)

b. Faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono yang dikutip dalam Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (2020:73-86), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti. Keempat, timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik terjadi karena kekurangan menyangkut sumber daya pembantu, misalnya waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan pembatasan yang kurang jelas.

Di sisi lain terdapat delapan faktor penyebab kebijakan tidak mendapatkan dampak yang diharapkan antara lain:

- a. Sumber yang tidak mencukupi.
- b. Metode pelaksanaan kebijakan.
- c. Masalah publik sebagai akibat dari berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya berfokus pada satu permasalahan.
- d. Cara masyarakat memberi respon dan membiasakan diri dengan kebijakan publik.
- e. Tujuan kebijakan saling bertentangan dengan yang lainnya.
- f. Biaya yang besar.
- g. Ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik
- h. Bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan.

c. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakandapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan

gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan- gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang undangan.

d. Aktor-aktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekanan dan organisasi komunitas.

1. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
2. Badan Legislatif, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.
3. Lembaga Peradilan, dapat terlihat dalam implementasi kebijakan ketika tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
4. Kelompok Kepentingan, dikarenakan dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada dimasyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan regulasi-regulasi.

5. Organisasi Komunitas, dalam hal ini adalah masyarakat baik individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai obyek dan atau subyek program.

4. Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Perilaku buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah, masyarakat masih BAB sembarangan di kali atau sungai. Data *Joint Monitoring Program* WHO/UNICEF 2014, sebanyak 55 juta penduduk di Indonesia masih berperilaku BAB sembarangan. Mereka pun bisa mandi dan mencuci pakaian di sungai yang sama. Akibatnya, mereka rentan terkena penyakit diare. Selain diare, balita mudah terserang pneumonia dari pencemaran tinja melalui udara.

Dampak penyakit yang paling sering terjadi akibat buang air besar sembarangan ke sungai adalah *Escherichia coli*. Itu merupakan penyakit yang membuat orang terkena diare. Setelah itu bisa menjadi dehidrasi, lalu karena kondisi tubuh turun maka masuklah penyakit-penyakit lain.

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskerdas) tahun 2012, sebanyak 39-40 juta orang yang buang air besar sembarangan, itu termasuk orang yang mempunyai WC, namun masih membuang kotorannya ke sungai. Riset yang dilakukan UNICEF dan WHO, juga menyatakan lebih dari 370 balita Indonesia meninggal akibat perilaku buruk BAB sembarangan.

WHO Juga mencatat 88 persen angka kematian akibat diare disebabkan kesulitan mengakses air bersih dan keterbatasan sistem sanitasi. Hal itu juga diperparah oleh perilaku BAB sembarangan. Selain penyakit perilaku BAB sembarangan juga memperbesar resiko yang menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.

Untuk menekan angka kematian akibat diare ini, semua pihak harus sadar dan bersegera membuat sanitasi termasuk toilet yang

sehat. Hal ini selaras dengan kegiatan yang dicanangkan pemerintah dalam bentuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Program STBM diyakini akan membuat anak-anak bisa tumbuh sehat dan memiliki pola hidup bersih. Namun untuk menjalankan komitmen ini butuh peran serta masyarakat dan banyak pihak terkait, agar semua cita-cita menurunkan angka kematian cepat terwujud. Semua orang harus memiliki jalan pikiran sama menghilangkan budaya BAB sembarangan.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan salah satu program Nasional di bidang sanitasi yang bersih lintas sektoral. Program ini telah dicanangkan pada bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2010 – 2014 ditetapkan pembangunan kesehatan. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Salah satunya adalah program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan menular dengan salah satu indikator utama pencapaian sasaran pada tahun 2014 adalah jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 20.000 desa. Peran pemerintah lewat Puskesmas adalah memfasilitasi dalam bentuk Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Advokasi dan Sosialisasi, Kampanye, Monitoring, Evaluasi, Serta Pembelajaran.

STBM sendiri merupakan suatu strategi dengan 5 pilar yang dikembangkan dan meliputi lima aspek penting yaitu :

- 1) Stop Buang air besar Sembarangan (Stop BABS) Suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

- 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
- 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT) PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.
- 4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dari lingkungan.
- 5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga Proses pengamanan limbah cair aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Secara khusus, STBM bukan dibuat untuk menyebarkan informasi semata, tetapi dengan dorongan dan dukungan terus menerus, sehingga terciptanya kesadaran terhadap sanitasi baik secara sikap maupun gaya hidup.

Dibaginya pelaksanaan STBM di bawah naungan lima pilar akan mempermudah upaya mencapai tujuan akhir STBM, tidak hanya untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik tetapi juga merubah dan mempertahankan keberlanjutan praktik-praktik budaya hidup bersih dan sehat. Sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan STBM terbagi dalam 4 tahapan, yaitu persiapan, pemicuan, tindak lanjut dukungan, serta pemantauan dan stimulasi perhatian yang dilakukan setelah deklarasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip program stop BABS :

1) Tanpa Subsidi.

Masyarakat tidak menerima bantuan dari pemerintah atau pihak lain untuk menyediakan sarana sanitasi dasarnya. Penyediaan

sarana sanitasi dasar adalah tanggung jawab masyarakat, sekiranya individu masyarakat belum mampu menyediakan sanitasi dasar, maka diharapkan adanya kepedulian dan kerjasama dengan anggota masyarakat lain untuk membantu mencairkan solusi.

2) Masyarakat sebagai pemimpin

Inisiatif pembangunan sarana sanitasi hendaknya berasal dari masyarakat. Fasilitator maupun wirausaha sanitasi hanya membantu memberikan masukan dan pilihan-pilihan solusi kepada masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas higienis dan sanitasinya. Semua kegiatan maupun pembangunan sarana sanitasi dibuat oleh masyarakat. Sehingga ikut campur pihak luar tidak diharapkan dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, biasanya akan tercipta natural-natural leader di masyarakat.

3) Tidak menggurui/memaksa

STBM tidak boleh disampaikan kepada masyarakat dengan cara menggurui dan memaksa mereka untuk mempraktikkan budaya higienis dan sanitasi, apalagi dengan memaksa mereka membuat/membeli jamban atau produk-produk STBM

4) Totalitas seluruh komponen masyarakat

Seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan-perencanaan-pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan. Keputusan masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif adalah kunci keberhasilan STBM. Sanitasi masyarakat adalah tahap perkembangan perubahan perilaku dari kebiasaan awal yang masih buang air besar sembarangan, tidak berperilaku cuci tangan dengan benar, tidak mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga berubah mempraktikkan perilaku higienis dan saniter dengan budaya sehari-hari hidup bersih dan sehat.

Adapun tujuan penyelenggaraan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diharapkan pada tahun 2025, Indonesia bisa mencapai sanitasi total untuk

seluruh masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia. STBM dapat dikatakan berhasil apabila ketika masyarakat secara keseluruhan sudah berperilaku higienis dan saniter maka dikatakan komunitas tersebut mencapai kondisi Desa/Kelurahan STBM dimana kondisi komunitas tersebut dengan kondisi sebagai berikut: 1.100% masyarakat sudah berubah perilakunya dengan status Desa/Kelurahan SBS (sudah terverifikasi oleh tim verifikasi dari puskesmas setempat), karena di zaman modern masih ada sangat banyak orang-orang maupun komunitas yang masih tempat terbuka kebiasaan ini masih sangat sulit untuk dihilangkan.

Terutama untuk BABS biasanya dilakukan di kebun, semak-semak, hutan, sawah, sungai maupun di tempat-tempat masyarakat secara kolektif membuat jamban yang dibuat tanpa ada lubang septik langsung dibuang ke tempat terbuka seperti sungai, rawa dll). Kebiasaan BABS ini terjadi karena tidak adanya pengamanan tinja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan baik untuk individu yang melakukan praktik BABS maupun komunitas lingkungan tempat hidupnya. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) masyarakat diharapkan dapat membuat Jamban/Wc yang sehat dan layak sesuai kriteria-kriteria STBM.

Adapun Jamban/Wc yang sehat dan layak sesuai kriteria-kriteria STBM sesuai dengan adalah :

- 1) Bangunan atas jamban dinding dan atap harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya. WC cubluk dengan ventilasi udara.
- 2) Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, Tempat jongkok (Kloset) terbuat dari bahan yang kuat, tidak licin dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
- 3) WC siram/leher angsa yang tersambung ke pipa pembangunan limbah (sewer) cubluk dengan slab atau papan yang menutup seluruh lubang.

- 4) Jarak pembuangan tinja ke sumur gali > 10 meter. Tidak menimbulkan bau, tidak boleh mengotori air permukaan disekitarnya, tidak ada tinja manusia terlihat disekitar rumah, kebun dan sungai.

Kondisi masyarakat seperti ini perlu diubah melalui sebuah kegiatan perubahan perilaku secara kolektif dengan pendekatan STBM, yang bisa dilakukan dengan cara:

- 1) Diadakan pemicuan ke masyarakat yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan atau masyarakat yang sudah terlatih menjadi fasilitator STBM.
- 2) Dari pemicuan tersebut diharapkan munculnya natural leader atau komite yang dibentuk oleh komunitas masyarakat tersebut.

Adapun hukum ditetapkannya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 852/Menkes/SK/IX/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah empat tahun bergulir kemudian dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan sebagai program kerja Sanitasi Setiap Puskesmas yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu (*Open Defecation Free*) yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

C. Kerangka Pemikiran

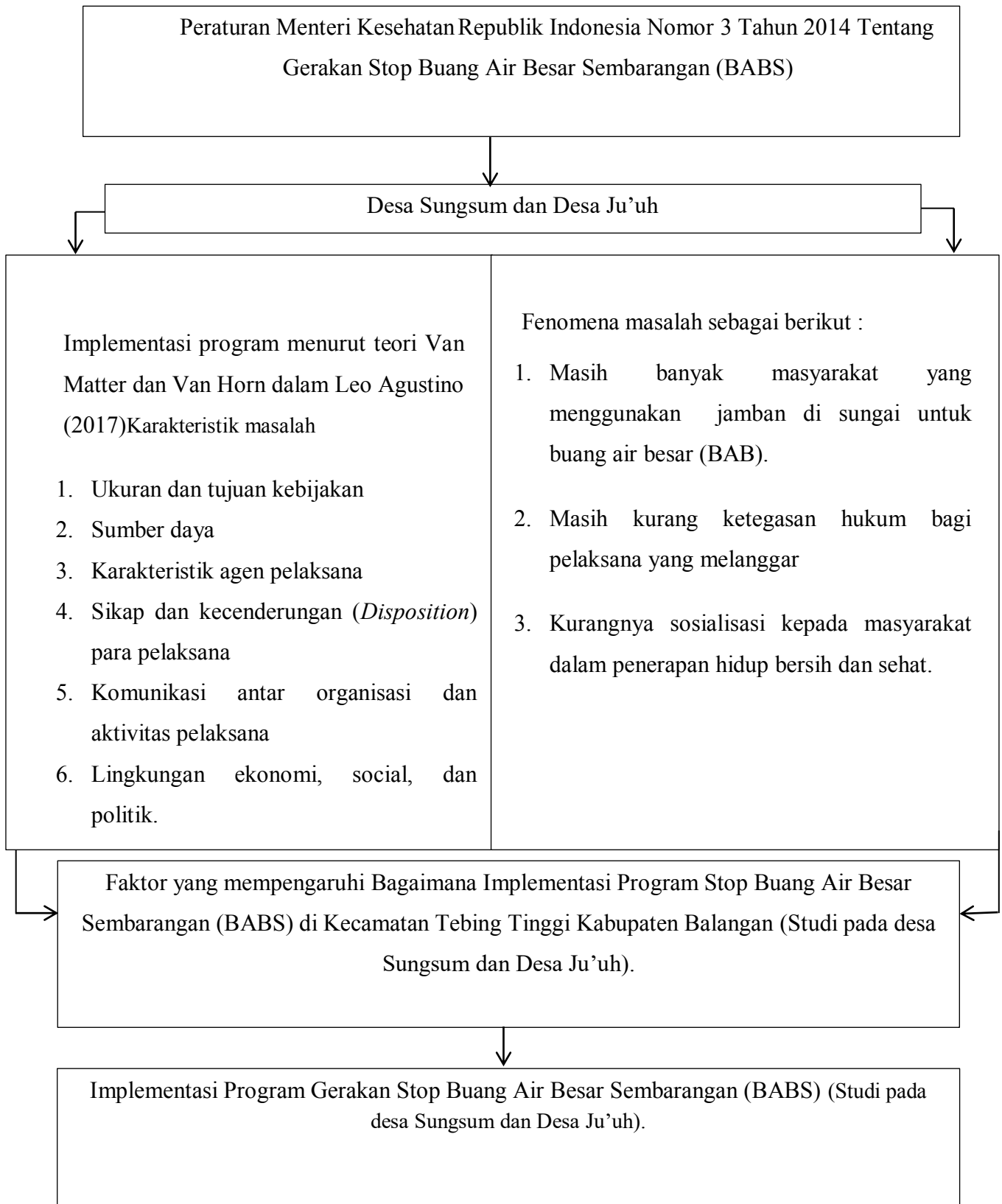
Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahami untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang diteliti secara logis dan sistematis.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini sumber awalnya beralasan dari mempengaruhi Bagaimana Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (Studi di desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap masyarakat yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Maka penelitian ini dijelaskan melalui teori Van Matter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2017) yang mempengaruhi kebijakan publik adalah :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap dan kecenderungan (Disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik.

Tabel 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Sungsum dan Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71667

B. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembuatan Proposal Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena menggambarkan secara tepat mengenai keadaan atau realita yang terjadi didalam masyarakat. Jadi, penulisan Proposal Skripsi menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Imam (2015:82) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

C. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitian (Anggara, 2015:21)

D. Data dan Sumber Data

Menurut sumber pengambilannya, data dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata

lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Sungsum dan Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Baik data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa literatur, jurnal, peraturan, situs di internet serta data pendukung yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Proposal Skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia,

peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip.

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam buku Harbani Pasalong (2016:141) *Purposive sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu menentukan peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut responden, orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan

Penelitian menggunakan teknik observasi maka sumber data di sebut informan. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, serta orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kesehatan	1 Orang
2	Pegawai Dinas Kesehatan	1 Orang
3	Kepala Desa Sungsum	1 Orang
4	Kepala Desa Ju’uh	1 Orang
5	Aparat Desa Sungsum	1 Orang
6	Aparat Desa Ju’uh	1 Orang
7	Masyarakat Desa Sungsum	3 Orang
8	Masyarakat Desa Ju’uh	3 Orang
		12 Orang

Sumber : Diolah Penulis, 2025

E. Desain Operasional

Berkaitan dengan penelitian mengenai Implementasi Program Stop Bunag Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan maka dirancanglah desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

Desain Operasional Penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan informasi tentang variable yang sedang diteliti. Instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan informasi atau data relevan tidaknya, tergantung pada alat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan memaparkan teori yang digunakan ke dalam desain operasional penelitian yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Subvariabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Dari melalui teori Van Matter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2017)	1. Ukuran dan Tujuan kebijakan	1. Ukuran kebijakan realistis 2. Tujuan kebijakan realistis
	2. Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Sarana dan prasarana
	3. Karakteristik agen pelaksana	1. Organisasi formal dan informal
	4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana (<i>Disposition</i>)	1. Penerimaan dari pelaksana 2. Penolakan dari pelaksana
	5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	1. Koordinasi pihak yang terlibat 2. Komunikasi pihak yang terlibat
	6. Lingkungan Ekonomi social dan politik	1. Lingkungan social 2. Lingkungan ekonomi 3. Lingkungan politik

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:62). Teknik yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara, yang peneliti maksud disini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada responden secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan segala pertanyaan difokuskan pada permasalahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data- data yang di peroleh sebelumnya.

2. Teknik Obsevasi (Pengamatan)

Observasi, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat setiap informasi sesuai dengan kenyataan yang dialami selama penelitian berlangsung. Pengalaman peneliti tersebut dapat terjadi berdasarkan melihat, mendengar, dan merasakan yang kemudian dilaporkan seobjektif mungkin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sedangkan dokumentasi yang peneliti maksud melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber data yang dianggap relevan, baik berupa rekaman baik melalui makalah, buku-buku, surat-surat, maupun sumber informasi lain seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengantur , mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab (Imam Gunawan, 2015:209)

Dalam menganalisa data lapangan, yang paling utama dilakukan adalah penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan alasan untuk mengetahui secara mendetail dan mendalam mengenai Program Stop Buang Air Besar

Sembarangan (BABS) di desa Sungsum dan Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan maka data yang dibutuhkan lebih bersifat uraian atau berupa penjabaran tentang apa yang diperoleh.

Setelah data di susun sesuai tema, kemudian dianalisis, dan ditafsirkan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain oleh peneliti. Dengan demikian karenanya teknik yang digunakan dalam menganalisis data penyusunan Proposal Skripsi ini adalah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dengan jalan membuat rangkuman inti (abstraksi) untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Matthew B. Milles dan Michael Huberman dalam Sugiyono (2015:207) menyatakan bahwa aktivitas dalam model analisis data kualitatif mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.
2. Penyajian data, berarti sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

Sehingga antara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis.

Semua data yang telah didapatkan selanjutnya akan diolah dan diuraikan dalam yang sifatnya menggambarkan apa adanya mengenai data lapangan dalam bentuk uraian kalimat. Sesudah itu data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah membahas dan menilai kembali data yang sudah disajikan, agar memudahkan dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik secara induktif, maksudnya mengambil kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang di temukan di lapangan.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2021:562), Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Peneliti mengambil beberapa antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan membercheck.

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Ketekunan dalam penelitian sangat diperlukan, tekun dalam menganalisis kasus, observasi lapangan maupun terjun kelapangan langsung agar mengetahui apa yang terjadi dilapangan sesungguhnya. Terkadang kita perlu ekstra dalam meneliti permasalahan yang harus diselesaikan dengan tempo pendek maupun panjang, tergantung kita melakukannya dalam ketekunan seperti apa yang harus dilakukan

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, karena data itu harus sesuai dengan sumber yang di dapat, jadi dapat mengetahui data yang seperti apa yang harus dicari dan sumber dari mana data itu di dapat.

Triangulasi sumber, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari berbagai data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisa lebih lanjut.

Triangulasi teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik penelitian yang berbeda, seperti dengan melakukan observasi, wawancara dan komunikasi.

Triangulasi waktu, Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Selain itu pula referensi sangat membantu dalam pembuat penelitian ini bukan hanya data saja melainkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Namun harus peka terhadap referensi yang ada, agar tidak mendapatkan referensi yang hoax. Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan referensi berupa rekaman pada saat wawancara dan data-data yang peneliti temukan pada saat penelitian.

4. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh para pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila yang ditemukan peneliti berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)*
- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Proposal Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Amuntai, STIA Amuntai.*
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, sahya 2018. *Kebijakan Pubilik. Bandung : CV Pustaka Setia.*
- Deddy Mulyadi.2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan public(Edisi revisi).*Bandung. ALFABETA
- Herdiansyah, Haris. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta*
- Gunawan, Imam. 2015.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Juniarti, V. R., Alfatih, A., & Siswanto, J. (2018). *Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) Studi Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018)* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Nugrahi, Farida.2014. ” *Metode Penelitian Kualitatif*”
- Pasalong, Harbani. 2016 *Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta.*
- Raudah. 2022. *Implementasi Peraturan Bupati Hulu Hulu Sungai Utara Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) Di Sungai Desa Hambuku Baru Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara STIA*
- Subarsono, cetakan XI 2022. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PUSTAKA SETIA

- Subarsono, AG. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono.2021. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan (R & D)*. Bandung. CV. ALFABETA
- Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Administrasi Dan (R&D)*.Bandung.ALFABETA
- Sugiyono.2015.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung.ALFABETA
- Wahab, Solichin Abdul. 2016.*Analisis Kebijakan*. Jakarta .Bumi Aksara.
- Internet : Di akses Pada bulan Oktober
- Anonim. 2017. *Buang Air Besar Sembarangan (BABS)* Tersedia: <http://dinkes.sumutprov.go.id/artikel/buang-air-besar-sembarangan-babs>. (02 Oktober 2025).
- Anonim.2019. *Buang Air Besar Sembarangan (BABS)* (02 Oktober 2025)
- Anonim. 2018. Perilaku Buang Air Besar. Tersedia: [http:// resposity.poltekkes-denpasar.ac.id](http://resposity.poltekkes-denpasar.ac.id) (diakses pada tanggal 02 Oktober 2025) Online
- Nia Puspita Sari, Susanti,(2021) Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan(BABS) Di desa Tanjung Penarap, Tebing Tinggi Barat. Jurnal. Pdf
- Jurnal. Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik(JMIAP). Meylan Siswara Handami, Aldri Frinaldi. 2020. *Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada smp negeri di kota padang*, Universitas Negeri Padang
- Jurnal. Mardewi Wahyuningsih,2016.*Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat* (Studi Pada Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro) Online